

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konflik antara Palestina dan Israel sudah berlangsung sejak lama dan sangat kompleks. Konflik antara Palestina dan Israel menjadi isu tanpa akhir. Pasalnya, dari kedua belah pihak menunjukkan perlawanan atas apa yang mereka perjuangkan. Konflik ini bermula dari upaya Israel untuk mengklaim tanah Palestina. Kedua belah pihak ingin memperjuangkan hak mereka atas wilayah tersebut. Penyelesaian konflik ini menjadi sulit karena tidak ada kesepakatan antara Palestina dan Israel. Palestina tetap tegas tidak akan membiarkan wilayahnya dikuasai oleh Israel, sementara Israel juga keras pada pendiriannya untuk mempertahankan batas wilayah yang ada sejak ditinggalkan oleh Inggris pada tahun 1948. Akibatnya, konflik ini tidak hanya melibatkan Palestina dan Israel saja, tetapi seluruh masyarakat dunia (Islamiyah, 2016).

Peristiwa konflik ini berdasarkan atas faktor sejarah, agama, politik dan ekonomi. Secara historis, wilayah Palestina awalnya berada di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Namun, setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dari Inggris dalam Perang Dunia I, wilayah tersebut kemudian jatuh di bawah kendali Inggris. Pada Desember 1917, Inggris, dipimpin Jenderal Edmund Allenby, menduduki Jerusalem. Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, mengeluarkan Deklarasi Balfour, pernyataan resmi pemerintah Inggris yang mendukung pendirian pemukiman Yahudi di Palestina. Perjanjian ini menjamin hak-hak minoritas dan melindungi hak sipil serta agama. Hasilnya, terdapat klaim historis yang saling bertentangan atas wilayah yang sama, di mana bangsa Yahudi menganggap Palestina sebagai tanah air mereka, sementara warga Palestina telah mendiami wilayah tersebut selama berabad-abad (Kulsum, 2023).

Berdasarkan tinjauan agama, wilayah Palestina merupakan tanah suci dari tiga agama besar, yakni Yahudi, Kristen dan Islam. Di tanah ini mereka bebas dalam beribadah, memilih pekerjaan, menikah, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan membangun rumah. Menurut catatan sejarah

dimulai sejak masa Nabi Musa. Setelah mengalami penindasan di Mesir dari Raja Fir'aun, bangsa Israel dipimpin oleh Nabi Musa dalam *eksodus* menuju Palestina. Namun, Nabi Musa meninggal sebelum mencapai tujuan, dan kepemimpinan diteruskan oleh Yosua bin Nun. Di bawah Yosua, bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordania dan memasuki wilayah Palestina, yang kemudian memicu konflik dengan suku-suku asli yang telah lama mendiami kawasan tersebut (Mamad et al., 2019).

Tinjauan dari sisi politik dimulai melalui pernyataan PBB nomor 181 (II) pada 29 November 1947, yang membagi Palestina menjadi tiga bagian: Negara Arab, Negara Yahudi dan Kota Yerusalem dan sekitarnya. Faktor inilah yang menjadi titik awal ketegangan politik antara penduduk Palestina dan Yahudi. Ini memicu reaksi demonstrasi besar-besaran dari penduduk Palestina yang menentang pembagian tersebut, sementara Yahudi merayakan keputusan tersebut. Ditambah dengan proklamasi berdirinya Negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948 dan diiringi dengan pengusiran massal warga Palestina (Nakba), dan semakin memperburuk ketegangan yang telah ada. Selain itu, pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan sejak tahun 1967 semakin memperburuk situasi, menyebabkan pengusiran warga Palestina dan menciptakan siklus kekerasan yang berkelanjutan (Mamad et al., 2019). Sebagai upaya perdamaian, kedua Negara yang berkonflik mengirimkan perwakilannya masing-masing untuk melakukan deklarasi rahasia di Oslo, Norwegia pada tahun 1993. Hasil utama perjanjian Oslo yaitu pembentukan Otoritas Nasional Palestina untuk mengelola Pemerintahan sendiri di bagian Tepi Barat (*West Bank*) dan Jalur Gaza (*Gaza Strip*), serta pengakuan Internasional terhadap *Palestine Liberation Organisation* PLO sebagai mitra Israel dalam negosiasi terkait konflik Israel-Palestina (Pusat Data dan Analisa Tempo, 2022: 54-56).

Meninjau dari faktor ekonomi, wilayah strategis Palestina yang menjadi titik bertemunya pusat peradaban besar dan jalur perdagangan yang menghubungkan Asia dengan pelabuhan-pelabuhan Eropa dan Afrika di basin Mediterania. Dalam studi UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) tahun 2019, para ahli geologi dan ekonomi sumber daya alam telah mengonfirmasi bahwa wilayah Palestina terletak di atas cadangan minyak

dan gas alam yang berlimpah tepatnya di area C Tepi Barat dan Pantai Mediterania di Jalur Gaza. Penemuan gas alam sebesar 122 triliun kaki kubik dan minyak sebanyak 1,7 miliar barel di Cekungan Levant menjadi peluang besar untuk mendistribusikan sekitar US\$524 miliar. Namun, ini dapat menjadi sumber konflik dan kekerasan yang baru jika dieksploitasi individual dan eksklusif tanpa memperhatikan hukum Internasional (United Nations, 2019).

Seiring dengan meningkatnya tekanan dan ketidakadilan yang dialami warga Palestina dari segi Politik, Ekonomi dan Sosial, berbagai bentuk perlawanan pun muncul. Gerakan perlawanan rakyat Palestina, termasuk Intifada—gelombang pemberontakan massal—muncul sebagai respons terhadap pendudukan dan kebijakan represif Israel. Konflik ini diperumit oleh dukungan Internasional, terutama dari Amerika Serikat kepada Israel. Sebaliknya, Negara-Negara Arab kurang mampu memberikan dukungan yang efektif kepada Palestina. Hal ini membuat warga Palestina hanya bisa bergantung pada kekuatannya sendiri.

Pada 7 Oktober 2023, kelompok Hamas—kelompok bersenjata dan gerakan politik Palestina yang beroperasi di Jalur Gaza—melancarkan serangan ke Kota Tel Aviv yang menewaskan sekitar 1.200 orang serta menyandera lebih dari 250 orang. Serangan ini kemudian direspons oleh Israel dengan serangan udara besar-besaran ke seluruh wilayah Gaza (BBC, 2024). Serangan militer Israel telah menewaskan puluhan ribu warga Palestina dan menghancurkan berbagai fasilitas publik di Gaza, termasuk rumah sakit, sekolah, masjid, dan gereja (Kulsum, 2023).

Serangkaian peristiwa ini melahirkan dukungan dan perlawanan dari berbagai kelompok di seluruh dunia. Di satu sisi, banyak pihak melihat Palestina sebagai korban penindasan dan kolonialisme oleh Israel, dengan narasi yang berakar pada hak asasi manusia dan keadilan sosial. Gerakan pro-Palestina sering menyoroti isu-isu seperti pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina, mengepung Gaza, serta tindakan militer yang dinilai tidak manusiawi. Gerakan-gerakan ini didukung oleh berbagai organisasi Internasional, aktivis hak asasi manusia, serta tokoh publik berpengaruh. Mereka menggunakan media sosial

sebagai platform utama untuk menyebarkan informasi, menyuarakan solidaritas, serta mengorganisir kampanye global seperti Gerakan Boikot-Divestasi-Sanksi (BDS) yang bertujuan untuk memberikan tekanan ekonomi dan politik kepada Israel (Ulya & Riksaning Ayu, 2023).

Sebaliknya, pendukung Israel lebih menekankan hak Israel untuk mempertahankan diri dari ancaman keamanan, terutama serangan roket dan aksi kekerasan oleh kelompok Palestina seperti Hamas. Narasi ini berfokus pada hak Israel untuk menjaga keamanan nasional dan melindungi warganya dari terorisme. Selain itu, hubungan sejarah dan religius Yahudi dengan tanah tersebut menjadi argumen yang sering dikemukakan. Sama seperti kelompok pro-Palestina, pendukung Israel juga aktif menggunakan media sosial sebagai platform untuk menyebarkan narasi mereka, menggalang dukungan, dan menyoroti ancaman keamanan yang dihadapi Israel.

Mengutip dari laman Kementerian Luar Negeri, Indonesia secara konsisten mendukung Palestina melalui berbagai tindakan diplomatik di kancah Internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi Internasional lainnya seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Gerakan Non-Blok (GNB), Indonesia sering mengadvokasi hak-hak Palestina, mendukung resolusi yang mengecam tindakan Israel, dan mendorong solusi dua Negara. Hal ini ditekankan lagi dalam Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja sama Islam (KTT OKI) yang diadakan pada tanggal 6-7 Maret 2016 di Jakarta. Dalam KTT tersebut, Indonesia berperan aktif dalam menyusun Deklarasi Jakarta yang menegaskan komitmen Negara-Negara anggota OKI untuk mendukung kemerdekaan dan hak-hak Palestina. Deklarasi ini menjadi bukti konkret dari upaya Indonesia dalam memperjuangkan isu Palestina di forum Internasional (Kemlu.go.id, n.d.).

Selain upaya diplomatik, Indonesia juga memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina, mencakup bantuan medis, makanan, dan kebutuhan dasar lainnya, yang disalurkan melalui lembaga-lembaga kemanusiaan dan kerja sama dengan organisasi Internasional. Pemerintah Indonesia, bersama dengan organisasi non-pemerintah (NGO), sering

menggalang dana dan mengorganisir berbagai program bantuan untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina. Peran NGO ini menjadi bukti dalam diplomasi kemanusiaan secara langsung yang diinisiasi oleh Indonesia sebagai Negara yang aktif dalam menyuarakan perdamaian dunia seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Suratiningsih & Puspita, 2020).

Dukungan masyarakat Indonesia di tingkat domestik terhadap Palestina sangat kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan kelompok aktivis secara rutin mengadakan aksi solidaritas, demonstrasi damai, dan kampanye media sosial untuk mendukung Palestina. Media sosial menjadi platform utama bagi masyarakat Indonesia untuk menyuarakan dukungan mereka, menginformasikan publik tentang situasi di Palestina, dan menggalang solidaritas global.

Posisi diplomatis Indonesia yang secara tegas mendukung perjuangan Palestina, tidak menjadikan masyarakat satu suara dalam menyikapi konflik ini. Sebagian besar warganet dan masyarakat menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Palestina, namun ada pula kelompok yang mendukung Israel dengan alasan bahwa Israel memiliki hak untuk mempertahankan diri dan keamanannya. Perbedaan pandangan ini mencerminkan dinamika masyarakat Indonesia, di mana kebijakan diplomatis yang jelas tidak selalu sejalan dengan kesatuan sikap masyarakat.

Dukungan terhadap Palestina di Indonesia sangat kuat, salah satunya melalui aksi massa yang dilakukan besar-besaran di beberapa kota besar serta tren *Hashtag #FreePalestina* yang mendominasi di media sosial. Di sisi lain, terdapat suara-suara yang mendukung Israel di media sosial melalui penggunaan *Hashtag #StandWithIsrael*, baik melalui komentar maupun pernyataan tokoh-tokoh tertentu, meskipun minoritas di Indonesia. Berdasarkan survei SMRC (Saiful Mujani Research And Consulting) pada Mei 2021, sebanyak 48% masyarakat Indonesia mendukung Palestina, sementara 2% menyatakan dukungan terhadap Israel. Sementara itu, ada 42% mengharapkan pemerintah membantu mencari jalan tengah untuk kedamaian Israel-Palestina, dan 9% lainnya menjawab tidak tahu (SMRC, 2021). Fenomena ini mencerminkan

keragaman opini masyarakat Indonesia yang tidak sepenuhnya satu suara meski posisi resmi pemerintah jelas mendukung Palestina.

Pernyataan yang muncul dari aktivis pendukung Israel Monique Rijkers—Jurnalis sekaligus pendiri organisasi nirlaba Hadassah of Indonesia—yang mendukung Israel melalui akun media sosialnya, seperti Facebook dan Instagram, pandangannya bertentangan dengan mayoritas netizen Indonesia yang lebih condong mendukung Palestina. Monique menyatakan bahwa banyak misinformasi yang tersebar di kalangan publik, seperti anggapan bahwa orang Yahudi ingin menyerbu Masjid Al-Aqsa, padahal menurutnya hal itu tidak benar. Ia juga membantah kabar yang mengatakan bahwa orang Yahudi bersukacita di Tembok Ratapan karena kebakaran, yang juga ternyata tidak berdasar (BBC News, 2021). Namun, pernyataan ini langsung dibantah oleh Muhammad Husein, seorang aktivis kemanusiaan di Gaza, yang menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, telah mengakui adanya serangan terhadap umat Muslim di Masjid Al-Aqsa. Husein menganggap bahwa pernyataan Monique tidak berdasarkan fakta yang diakui oleh pejabat tinggi Israel (Triyoga, 2021).

Fenomena serupa juga terjadi pada penolakan Indonesia terhadap kehadiran Timnas Israel di Piala Dunia U-20 2023, yang menimbulkan polarisasi di masyarakat. Kelompok yang mendukung Palestina mendukung keputusan ini sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan Palestina, sementara sebagian masyarakat lainnya berargumen bahwa olahraga seharusnya bersifat netral dan tidak dicampuradukkan dengan politik (Tumanggor, 2023). Penolakan terhadap Timnas Israel menunjukkan bahwa sikap pro-kontra terkait konflik Israel-Palestina sangat jelas tergambar di Indonesia, baik di level individu melalui media sosial, seperti yang ditunjukkan oleh aktivis seperti Monique Rijkers, maupun di level nasional dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kedua kasus ini menggambarkan konflik Palestina-Israel mampu menghadirkan dinamika dan mempengaruhi sikap masyarakat Indonesia dalam berbagai konteks, baik dalam hal kebijakan luar negeri maupun dalam perdebatan sosial di ruang publik.

Fenomena ini mencerminkan munculnya gerakan sosial baru di media sosial seperti Instagram, X (sebelumnya bernama Twitter), FB dan Telegram, di mana individu dan kelompok memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan pandangan dan membentuk opini publik. Salah satu contoh utama adalah platform media sosial X yang telah menjadi alat penting dalam mewujudkan gerakan sosial baru. Media sosial X memungkinkan pengguna untuk dengan cepat menyebarkan informasi, mengorganisir aksi, dan memobilisasi dukungan di seluruh dunia. Gerakan sosial di media sosial X mencerminkan platform digital dapat menjadi alat mobilisasi yang kuat, menghubungkan orang-orang dengan pandangan serupa dan memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Platform ini menyediakan ruang bagi berbagai perspektif dan memfasilitasi diskusi yang luas dan terbuka, meskipun begitu pengguna diharapkan kritis terhadap informasi yang diterima serta disebar di platform digital. Media sosial X berperan dalam memperkuat suara-suara yang mungkin sebelumnya terpinggirkan dan memberikan mereka panggung, sehingga mempercepat dinamika perubahan sosial (Putraji, 2022).

Selain itu, Telegram juga telah muncul sebagai platform penting dalam mendukung gerakan sosial baru. Mengutip *World Population Review*, data pengguna aktif Telegram di Indonesia mencapai 27,21 juta pada tahun 2024. Telegram menunjukkan potensi besar untuk digunakan dalam mengorganisir dan memobilisasi komunitas secara efektif. Telegram menawarkan berbagai fitur yang mendukung mobilisasi dan komunikasi, seperti grup yang dapat menampung hingga 200.000 anggota dan saluran yang memudahkan penyebaran informasi secara efektif. Dengan fitur *enkripsi end-to-end* pada obrolan rahasia, Telegram memberikan tingkat keamanan yang tinggi, memastikan bahwa komunikasi sensitif tetap terlindungi (World Population Review, 2024).

Fitur-fitur yang ditawarkan Telegram memberikan kemudahan pada penggunanya. Salah satu fungsi utama adalah fitur *chat bot*, yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan respons otomatis sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. Selain itu, Telegram menyediakan fitur *channel* (saluran), yang ditandai dengan komunikasi searah; hanya administrator yang memiliki hak istimewa untuk menyebarkan pesan, sementara peserta lain hanya

dapat mengakses konten dapat tanpa melihat identitas sesama anggota saluran. Telegram juga memiliki fitur *polling*, yang memungkinkan pengguna untuk membuat survei di antara peserta grup untuk mengumpulkan umpan balik dalam bentuk pilihan yang tersedia. Fitur lain yang sering digunakan oleh peserta grup adalah fitur *space* (ruang), yaitu siaran audio langsung yang diinisiasi oleh administrator grup dan diakses oleh semua anggota kelompok (Afrilia & Medhy, 2024).

Fitur yang terbaru yang diperkenalkan oleh Telegram yaitu, Fitur *topic* (topik), yang dirancang untuk membantu mengelola obrolan grup besar dengan lebih dari 200 anggota. Fitur ini berfungsi untuk menjaga diskusi tetap fokus dan relevan, serta memudahkan anggota dalam menemukan percakapan tertentu. Fitur topik berkerja sebagai ruang obrolan terpisah dengan media terbagi dan pengaturan notifikasi khusus. Anggota dapat bergabung ke dalam topik yang relevan dan berpartisipasi aktif dalam diskusi (Telegram.org., 2022).

Penggunaan media Telegram sebagai platform untuk mendukung Gerakan sosial baru, salah satunya tercermin pada grup Julid Fi Sabilillah. Gerakan #JulidFiSabilillah merupakan aksi pro-Palestina yang awalnya beroperasi di media sosial sebagai bentuk perlawanan terhadap genosida yang dialami masyarakat Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina kembali memanas pada 7 Oktober 2023, dengan serangan yang dilakukan oleh Israel menarik perhatian dunia. Peristiwa tragis seperti anak-anak menjadi korban reruntuhan bangunan, bayi kelaparan, perempuan mengalami keguguran, serta penahanan dan penyiksaan terhadap individu tak bersalah telah didokumentasikan dan dilaporkan secara luas. Selain dampak langsung kekerasan, situasi ini juga diperburuk oleh penyebaran misinformasi dan propaganda digital yang memperburuk kondisi wilayah tersebut. Situasi ini mendorong Erlangga Greschinov, seorang multilingual bahasa sekaligus inisiator gerakan #JulidFiSabilillah, untuk meluncurkan gerakan perlawanan melalui media sosial sebagai bentuk dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina (Greschinov, 2024).

Gerakan Julid Fi Sabilillah berfokus pada membangun narasi perlawanan atas kebohongan yang tersebar melalui propaganda digital, baik dengan cara memengaruhi opini publik secara psikologis maupun memaparkan fakta yang bertentangan dengan klaim zionis dengan memanfaatkan media sosial. Strategi inilah yang menjadi inti dalam #JulidFiSabilillah. Sedangkan, istilah 'Julid Fi Sabilillah' merupakan adaptasi dari kata 'Jihad Fi Sabilillah' yang berarti perjuangan di jalan Allah. Perubahan kata 'Jihad' menjadi 'Julid' mencerminkan tren bahasa milenial, di mana 'Julid' diartikan sebagai keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun sulit (Qoirunnisa & Mustofa, 2024).

Penggunaan *Hashtag* #JulidFiSabilillah, yang diinisiasi oleh warganet di Indonesia, menunjukkan potensi platform media sosial dapat berfungsi sebagai alat mobilisasi yang efektif. Melalui akun X milik Erlangga Greschinov, Gerakan sosial baru ini dituangkan dalam *Hashtag* Julid Fi Sabilillah. *Hashtag* ini digunakan untuk memperkuat solidaritas dan menarik perhatian publik terhadap isu yang diangkat. Salah satu contoh unggahan dalam gerakan ini adalah 'Pengumuman Teknis Operasi Julid Fi Sabilillah Brigade Hassan bin Tsabit,' yang ditujukan kepada akun tentara *Israel Defence Forces* (IDF). Unggahan ini menciptakan respons emosional, seperti ribuan komentar dan *repost*, serta menyebar luas di berbagai platform media sosial. Pada awalnya gerakan ini menargetkan tentara dan polisi Israel. Namun, seiring berkembangnya dinamika konflik, sasaran gerakan meluas hingga mencakup individu-individu pro-Israel yang secara terbuka menyatakan dukungannya (Qoirunnisa & Mustofa, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian dari artikel jurnal Qoirunnisa & Mustofa (2024) yang berfokus pada peran warga Indonesia dalam mendukung Palestina melalui aktivisme daring menggunakan *Hashtag* Julid Fi Sabilillah di media sosial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa gerakan ini memainkan peran penting dalam membentuk opini publik global mengenai konflik Israel-Palestina, terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Gerakan ini menggunakan platform media sosial X untuk memobilisasi dukungan global terhadap Palestina.

Temuan penelitian artikel jurnal lainnya oleh Selvia Santi (2024) dengan mengkaji gerakan Julid Fi Sabilillah sebagai Gerakan sosial baru di Indonesia yang menggunakan media sosial untuk memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Hasilnya menunjukkan bahwa gerakan ini berhasil menarik partisipasi aktif kaum milenial, mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, serta berkontribusi pada kesadaran global mengenai hak asasi manusia dan penindasan.

Kedua temuan di atas berfokus pada jaringan penggunaan *Hashtag* Julid Fi Sabilillah di media sosial serta peranannya dalam membentuk suatu gerakan sosial. Namun, kedua penelitian ini tidak berfokus pada satu media sosial tertentu, sehingga cakupannya menjadi terlalu luas. Oleh karena itu, peneliti menemukan celah penelitian dan tertarik untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang gerakan Julid Fi Sabilillah dalam grup komunitas di Telegram, milik Erlangga Greschinov. Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana Gerakan sosial baru diwujudkan dalam grup komunitas ini, dengan mempertimbangkan peran Telegram dalam mobilisasi dan memengaruhi persepsi partisipasi anggota komunitas di era digital.

1.2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah yang ingin dijawab oleh peneliti, yaitu: Bagaimana proses Gerakan sosial baru pro Palestina dalam grup Telegram Julid Fi Sabilillah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui proses Gerakan sosial baru pro Palestina dalam grup Telegram Julid Fi Sabilillah.

1.4. Manfaat penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara praktis maupun secara teoritis. Adapun manfaat penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana Gerakan sosial baru, seperti di grup Telegram Julid Fi Sabilillah, berfungsi dan berkembang di era digital. Penelitian ini juga dapat membantu komunitas-komunitas untuk lebih memahami dan mengoptimalkan penggunaan platform digital dalam mengorganisir gerakan sosial, serta memberikan panduan praktis bagi komunitas lain yang ingin mengikuti jejak mereka.

2. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini dapat memperkaya literatur tentang bagaimana Gerakan sosial baru terbentuk, berjalan, dan berkembang dalam media sosial, serta menambah pemahaman teoritis mengenai peran dan dampak media sosial, seperti penggunaan platform Telegram untuk mobilisasi dan advokasi anggota komunitas.